

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2013-2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Kabupaten, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 51 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pati Tahun 2013 – 2017 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama;
8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013-2017 (Berita Daerah Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013-2017.

Pasal I

Ketentuan huruf A dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 51 tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013-2017 (Berita Daerah Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor 553) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 34 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 51 TAHUN 2013
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PATI TAHUN 2013-2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
 TAHUN 2017**

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN	KETERANGAN
1. Tercukupinya daya tampung pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.	1. Bangunan sekolah yang berkondisi baik (%)	$\frac{\sum \text{bangunan SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK; baik}}{\sum \text{bangunan SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK}} \times 100\%$	<p>Daya tampung pendidikan dasar dan menengah adalah ketersediaan sarana pendidikan yang memadai, salah satunya adalah gedung sekolah yang layak bagi penyelenggaraan kegiatan pendidikan.</p> <p><i>Jenis data: prosentase</i> <i>Sumber data: Profil Pendidikan</i> <i>Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan</i></p>
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	$\frac{\sum \text{Siswa SD/MI/Paket A Usia 7 - 12 Tahun}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \times 100\%$	<p>Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa Kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam Persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.</p> <p><i>Jenis data: Prosentase</i> <i>Sumber data: Profil pendidikan</i> <i>Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan</i></p>
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	$\frac{\sum \text{Siswa SMP/MTs/Paket B Usia 13 - 15}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \times 100\%$	
	4. Rasio guru terhadap murid	Perbandingan Guru dengan Jumlah siswa dalam rombongan belajar	Rasio guru terhadap murid dapat menunjukkan daya tampung pendidikan disuatu kawasan.

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN	KETERANGAN
			Rasio guru terhadap murid sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru <i>Jenis data: rasio</i> <i>Sumber data: Profil pendidikan</i> <i>Peanggung jawab: Dinas Pendidikan</i>
2. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan dijenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan.	5. Angka kelulusan SD/MI (%)	$\frac{\sum \text{Peserta Ujian yang Lulus SD/MI}}{\sum \text{jumlah Seluruh Peserta Ujian SD/MI}} \times 100\%$	Angka Kelulusan merupakan rasio jumlah lulusan yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang pendidikan tertentu pada tahun ajaran sebelumnya.
	6. Angka kelulusan SMP/MTs (%)	$\frac{\sum \text{Peserta Ujian yang Lulus SMP/MTs}}{\sum \text{jumlah Seluruh Peserta Ujian SMP/MTs}} \times 100\%$	<i>Jenis data: Prosentase</i> <i>Sumber data: Profil pendidikan</i> <i>Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan</i>
	7. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs (%)	$\frac{\sum \text{siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\sum \text{lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Angka Melanjutkan merupakan rasio jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu tahun ajaran sebelumnya.
	8. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	$\frac{\sum \text{siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\sum \text{lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	<i>Jenis data: Prosentase</i> <i>Sumber data: Profil pendidikan</i> <i>Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan</i>
	9. Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	$\frac{\sum \text{guru berijazah kualifikasi S1/D - IV}}{\sum \text{Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$	Tingginya prosentase guru yang memenuhi S1/DIV menunjukkan bahwa kualitas dan kompetensi tenaga pendidikan <i>Jenis data: Prosentase</i> <i>Sumber data: Profil pendidikan</i> <i>Penanggung Jawab: Dinas Pendidikan</i>
3. Meningkatnya budaya baca masyarakat.	10. Jumlah Perpustakaan	$\sum \text{Perpustakaan yang ada di Kabupaten Pati (unit)}$	Tersedianya ruang baca taman baca atau perpustakaan di sekolah, perguruan tinggi, desa, tempat ibadah dan kantor-kantor yang Sesuai Dengan Kreteria pedoman penyelenggaraan perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa yang disusun oleh Perpunas RI menggambarkan bahwa budaya baca mencakup seluruh kalangan masyarakat. <i>Jenis data: kuantitatif</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>
	11. Jumlah Pengunjung perpustakaan	$\sum \text{Pengunjung Perpustakaan daerah Kabupaten Pati (orang)}$	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (Satuan Orang) dapat menjadi indikasi minat baca masyarakat.

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN	KETERANGAN
			<p><i>Jenis data: kuantitatif</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i></p>
	12. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\sum \text{buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati (Eksplor)}$	<p>Jumlah Koleksi buku di perpustakaan daerah (Satuan Eksemplar) menjadi keseriusan upaya pemerintah dalam meningkatkan minat baca masyarakat</p> <p><i>Jenis data: kuantitatif</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i></p>
4. Menurunnya AKI, AKB, AKBAL dan balita gizi buruk.	13. Kematian Ibu (kasus)	$\frac{\sum D_{\text{hamil}}}{\sum LH} \times 1000$ <p>D_{hamil} : Jumlah Kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran JLH : Jumlah Kelahiran Hidup</p>	<p>Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, Utomo. 1985).</p> <p>Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), (https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=80)</p> <p><i>Jenis data: angka</i> <i>Sumber data: Profil kesehatan</i> <i>Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten</i></p>
	14. Kematian Bayi (kasus)	$\frac{\sum K_{0-1th}}{\sum \text{Kelahiran hidup}} \times 1000$ <p>K₀₋₁ = Kematian Usia di bawah 1 (satu) tahun</p>	<p>Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.</p>

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN	KETERANGAN
			<p><i>Jenis data: angka</i> <i>Sumber data: Profil kesehatan</i> <i>Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Kabupaten</i></p>
	15. Prevalensi balita gizi buruk (%)	$\frac{\sum \text{Jumlah balita gizi buruk}}{\sum \text{jumlah seluruh balita}} \times 100\%$	<p>Status gizi balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Berat badan anak ditimbang dengan timbangan dacin yang memiliki presisi 0,1 kg, panjang badan diukur dengan length-board dengan presisi 0,1 cm, dan tinggi badan diukur dengan menggunakan microtoise dengan presisi 0,1 cm. Variabel BB dan TB anak ini disajikan dalam bentuk tiga indikator antropometri, yaitu: berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).</p> <p>Untuk menilai status gizi anak, maka angka berat badan dan tinggi badan setiap balita dikonversikan ke dalam bentuk nilai terstandar (Z-score) dengan menggunakan baku antropometri WHO 2005. Kategori Gizi Buruk, jika Z-score < -3,0</p> <p><i>Jenis data: angka</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Kabupaten</i></p>
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	16. Cakupan pelayanan gawat darurat kesehatan dasar di puskesmas yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) (%)	$\frac{\sum \text{pelayanan gawat darurat level 1}}{\sum \text{Jumlah RS kab/kota}} \times 100\%$	<p>Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 adalah pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RS Daerah) Kabupaten/Kota. Sedangkan gawat darurat level 1 itu sendiri merupakan tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum <i>on site</i> 24 jam dengan kualifikasi GELS (<i>General Emergency Life Support</i>) dan/atau ATLS (<i>Advance Trauma Life Support</i>) + ACLS (<i>Advance Cardiac Life Support</i>), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.</p> <p>Cakupan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurunwaktu tertentu (lama dan baru). Adapun yang dimaksud dengan sarana kesehatan strata dua dan strata tiga adalah balai kesehatan mata masyarakat, balai pengobatan penyakit paru, balai kesehatan indera masyarakat, balai besar kesehatan paru masyarakat, rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta. (Lampiran Kepmenkes Nomor : 828/MENKES/SK/IX/2008)</p> <p><i>Jenis data: Prosentase</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Kabupaten</i></p>
	17. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	$\frac{\sum \text{pasien maskin di sarkes strata 2 dan 3}}{\sum \text{Jumlah masyarakat miskin}} \times 100\%$	

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN	KETERANGAN
6. Meningkatnya kesehatan lingkungan serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.	18. Cakupan desa siaga aktif (%)	$\frac{\sum \text{Desa Siaga Aktif}}{\sum \text{Desa siaga yang dibentuk}} \times 100\%$	Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk <i>Jenis data :Ukuran/Konstanta Persentase (%)</i> <i>Sumber Data : Hasil pencatatan kegiatan Puskesmas dan Laporan Profil PSM/UKBM. (Lampiran Kepmenkes Nomor : 828/MENKES/SK/IX/2008)</i> <i>Penanggung Jawab: Dinas Kesehatan Kabupaten</i>
	19. Persentase posyandu aktif (%)	$\frac{\sum \text{posyandu aktif}}{\sum \text{pos yandu yang dibentuk}} \times 100\%$	
1. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak	1. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas (%)	$\frac{\sum \text{perempuan usia 15 tahun keatas melek huruf}}{\sum \text{perempuan usia 15 tahun keatas kabupaten}} \times 100\%$	Kesetaraan gender dapat dilihat dari meningkatnya perempuan usia 15 tahun yang melek huruf dan semakin meningkatnya perempuan pekerja. Upaya Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dilihat melalui penanganan terhadap pengaduan yang dapat diselesaikan. <i>Jenis data: prosentase</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: : Dinas Sosial</i>
	2. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	$\frac{\sum \text{angkatan kerja perempuan}}{\sum \text{angkatan kerja Kabupaten}} \times 100\%$	
	3. Prosentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	$\frac{\sum \text{pengaduan yang diselesaikan}}{\sum \text{pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tingkat kekerasan}} \times 100\%$	
2. Meningkatnya fasilitasi dan penguatan kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM.	4. Persentase koperasi aktif (%)	$\frac{\sum \text{Koperasi Aktif}}{\sum \text{Koperasi di kabupaten}} \times 100\%$	Koperasi aktif : Koperasi yang mempunyai kegiatan atau usaha dan patuh perundang-undangan (UU no 25/1992 tentang Perkoperasian). Usaha Mikro : Usaha yang mempunyai asset sampai dengan 50 Juta; Usaha Kecil : Usaha yang mempunyai asset 50 Juta sampai dengan 500 juta; Usaha Menengah : Usaha yang mempunyai asset 500 Juta sampai dengan 10 M Dengan adanya fasilitas pemerintah, maka akan meningkatkan usaha mikro, serta naik kelas status usaha mikro ke usaha kecil (UU no 20/2008 tentang UMKM). Koperasi aktif dan besarnya pelaku usaha mikro menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan dalam fasilitasi dan penguatan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro <i>Jenis data: prosentase</i> <i>Penanggung Jawab: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</i>
	5. Persentase usaha mikro dan kecil terhadap jumlah UKM (%)	$\frac{\sum \text{Unit Usaha Mikro}}{\sum \text{Usaha Kecil Menengah}} \times 100\%$	

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN	KETERANGAN
3. Meningkatnya produksi pertanian.	6. Produksi tanaman pangan padi sawah (ton)	$\sum \text{Produksi Padi (ton)}$	<p>Produksi padi dan jagung adalah komonditi pertanian utama kabupaten pati, meningkatnya produksi padi dan jagung sebagai indikator utama dalam menilai produksi pertanian, produktifitas digunakan untuk meningkatkan produksi karena estimasi luas yang semakin menurun.</p> <p><i>Jenis data: absolut pertahun</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Pertanian</i></p>
	7. Produksi tanaman pangan jagung (ton)	$\sum \text{Produksi Jagung (ton)}$	
	8. Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\sum \text{Produksi (kw)}}{\sum \text{Luas Areal tanam (Ha)}}$	
4. Meningkatnya produksi Perikanan	9. Perikanan tangkap	$\sum \text{Produksi ikan tangkap (ton)}$	<p>Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi perikanan tangkap laut dan produksi perikanan tangkap perairan umum.</p> <p><i>Jenis data: absolut per tahun</i> <i>Sumber data: Profil Perikanan Kabupaten</i> <i>Penanggung Jawab: Dinas Kelautan Perikanan</i></p>
	10. Perikanan budidaya	$\sum \text{Produksi ikan budidaya (ton)}$	<p>Produksi perikanan budidaya dari berbagai jenis ikan dan pola pemeliharannya.</p> <p><i>Jenis data: absolut per tahun</i> <i>Sumber data: Profil Perikanan Kabupaten</i> <i>Penanggung Jawab: Dinas Kelautan Perikanan</i></p>
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	11. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	$\frac{\sum \text{Jalan dalam Kondisi Baik/sedang}}{\sum \text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	<p>Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu lintas, menyebabkan kendaraan harus berjalan secara perlahan lahan, mengurangi kecepatan, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.</p> <p><i>Jenis data: prosentase</i> <i>Sumber data: SPM PU dan TR bidang bina marga untuk jalan kabupaten/ kota</i> <i>Penanggung Jawab: Dinas Pekerjaan Umum</i></p>
	12. Panjang jalan dilalui roda 4	$\sum \text{jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (km)}$	<p>Jaringan jalan dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun apabila jaringan jalan tersebut masuk dalam kategori jalan mantap, yaitu jalan yang masuk dalam kriteria jalan kondisi beraspal baik maupun beraspal rusak.</p> <p><i>Jenis data: kuantitatif absolut</i> <i>Sumber data: SPM PU dan TR bidang bina marga untuk jalan kabupaten/ kota</i> <i>Penanggung Jawab: Dinas Pekerjaan Umum</i></p>

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN	KETERANGAN
6. Meningkatnya ketersediaan jaringan air bersih dan sanitasi.	13. Rumah tangga bersanitasi (%)	$\frac{\sum \text{Rumah Tangga bersanitasi}}{\sum \text{Rumah Tangga kabupaten}} \times 100\%$	<p>Proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di wilayah dan pada periode waktu tertentu adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dengan penduduk seluruhnya dinyatakan dalam prosentase.</p> <p><i>Jenis data: prosentase</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Perumahan dan Pemukiman</i></p>
	14. Rumah tangga pengguna air bersih (%)	$\frac{\sum \text{Rumah Tangga Pengguna air bersih}}{\sum \text{Rumah Tangga kabupaten}} \times 100\%$	<p>Status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Pati dengan menggunakan indikator target Proporsi Penduduk atau rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) di wilayah tertentu pada periode waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk atau rumah tangga seluruhnya pada wilayah dan periode yang sama dan dinyatakan dalam persentase. Hal yang sama juga untuk indikator rumah tangga pengguna air bersih.</p> <p><i>Jenis data: prosentase</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Perumahan dan Pemukiman</i></p>
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	15. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	$\frac{\sum \text{Luas irigasi kondisi baik}}{\sum \text{Luas Irigasi kabupaten}} \times 100\%$	<p>Jaringan irigasi merupakan keseluruhan saluran yang terdiri dari saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah (subak), dengan kondisi baik yang dimaksud adalah jaringan irigasi memiliki kerusakan saluran irigasi < 10 % dari total panjang saluran irigasi.</p> <p><i>Jenis data: prosentase</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Pekerjaan Umum</i></p>
8. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	16. Rumah tangga pengguna listrik (%)	$\frac{\sum \text{Rumah tangga pengguna listrik di kabupaten}}{\sum \text{rumah Tangga kabupaten}} \times 100\%$	<p>Kualitas Kawasan Pemukiman dan perumahan dapat dinilai dengan meningkatnya jumlah rumah tangga layak huni dan menggunakan listrik</p> <p>Kriteria rumah layak huni sesuai dengan Konsep rumah layak huni yang digunakan disini adalah konsep dari Kementerian Perumahan Rakyat. Variabel dilihat adalah kualitas dari jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah.</p> <p><i>Jenis data: prosentase</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Perumahan dan Pemukiman</i></p>
	17. Rumah layak huni (%)	$\frac{\sum \text{rumah layak huni di kabupaten pati}}{\sum \text{rumah di suatu wilayah kabupaten}} \times 100\%$	

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN	KETERANGAN
9. Meningkatnya minat pengusaha dan nilai investasi.	18. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	$\sum \text{Perusahaan (PMDN/PMA)}$	<p>Jumlah investor dan nilai investasi menunjukkan besarnya minat pengusaha melakukan investasi di suatu kawasan.</p> <p>Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.</p> <p>Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. (Undang-Undang 25 Tahun 2007 ttg Penanaman Modal)</p> <p><i>Jenis Data : kuantitatif absolut</i> <i>Sumber Data : Data Business Intelligence Badan Koordinasi Penanaman Modal.</i> <i>Penanggung Jawab: Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu</i></p>
	19. Jumlah nilai investasi berskala nasional (M.rupiah)	$\sum \text{Investasi Bersekala Nasional (milyard)}$	
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	20. Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	$\frac{\sum \text{Angkatan Kerja}}{\sum \text{Penduduk 15 th Keatas}} \times 100 \%$	<p>Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah</p> <p>Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.</p> <p><i>Contoh : Jika TPAK 66% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.</i></p> <p><i>Jenis data: Prosentase</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Tenaga Kerja</i></p>
	21. Tingkat pengangguran terbuka (%)	$\frac{\sum \text{Pengangguran}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$	<p>Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. Variabel untuk menyusun indikator ini juga diperoleh dari Sakernas dan Sensus Penduduk.</p> <p><i>Jenis data: prosentase</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Tenaga Kerja</i></p>
	22. PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	$\frac{\sum \text{PMKS yang mendapat bantuan}}{\sum \text{PMKS kabupaten}} \times 100\%$	<p>Masyarakat salah satunya adalah PMKS, peningkatan kesejahteraannya dapat diukur dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan.</p> <p><i>Jenis Data: absolut</i> <i>Sumber data : pelaksanaan Kegiatan bantuan PMKS</i></p>

SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN	KETERANGAN
			<i>Penanggung Jawab: Dinas Sosial</i>
	23. Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (%)	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\sum \text{Tenaga kerja kabupaten}} \times 100\%$	Jaminan sosial tenaga kerja sebagai salah satu ukuran kesejahteraan bagi masyarakat khususnya tenaga kerja. <i>Jenis data: Prosentase</i> <i>Sumber data dan Penanggung Jawab: Dinas Tenaga Kerja</i>

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010